

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.A. Latar Belakang Masalah

India merupakan negara terluas dan secara demografi, merupakan negara terpadat di dunia setelah Cina. India identik dengan masyarakat Hindu dan sistem kastanya. Pada masa Veda susunan masyarakat India dibagi dalam kasta berdasarkan profesi atau mata pencaharian. Pada perkembangan selanjutnya yaitu masa Hindu, masyarakat India disusun dengan sistem kasta berdasarkan keturunan (Wolfert,1989;28-32). Masyarakat India terdiri dari dua agama besar yaitu Hindu dan Islam,dan merupakan sumber kekuatan spiritual dan kerapatan sosial bagi para pengikutnya. Sebagian besar mengenai keterbelakangan ekonomi India terletak pada struktur sosial, konsep agama dari tradisi yang ketat (Negara dan Bangsa,1989: 124)

Awal kedatangan Inggris di India bertujuan untuk usaha ekonomi, namun lambat laun Inggris berupaya untuk memperoleh kewenangan melakukan perdagangan dengan bebas didasarkan pada *Regulating Act* 1773, yang dikeluarkan oleh Waren Hasting (1767-1784) isinya memberikan EIC otoritas untuk melaksanakan dan mengurus rumah tangganya, termasuk urusan sosial budaya, politik, ekonomi dan pertahanan, namun untuk beberapa urusan yang harus disahkan terlebih dahulu oleh parlemen misalnya penentuan perjanjian dengan pihak tertentu (Mulia,1952:74). Undang-undang ini berarti Inggris berupaya memperbaharui struktur pemerintahan India dan secara tidak langsung menguasai India. Berdasarkan *Regulating Act*, India terbagi dalam 3 Presidensi

yaitu Bengal, Bihar dan Madras. India berarti dalam kekuasaan seorang Gubernur Jendral dan Dewan komisi (Johari,1991:57,Nehru,1960;207).

Kebijakan EIC dalam perluasan daerah kekuasaan Inggris di India berlanjut pada kebijakan *Pitt Act* 1784, diterapkan pada masa Lord Cornwallis(1784-1793) yang bertujuan membangun suatu daerah taklukan dan menjadi pihak penguasa di India. Selain *Pitt Act* 1784(Wolfert,1989;195), Cornwallis pun mengeluarkan *Permanent Settlement Act*,yaitu undang-undang yang mengatur hal pemilikan tanah. Undang-undang itu meliputi pada peranan para *zamindar* ( tuan tanah) untuk mengurus tanah miliknya, berusaha untuk melindungi petani penyewa, dan menjamin kas EIC tidak kosong dari pajak yang dibebankan setiap tahun. Namun, dalam kenyataannya para pemilik tanah kehilangan tanahnya akibat tanah-tanah tersebut dijual dan dilelang oleh pemerintah Inggris untuk dijual kembali pada pemilik baru.

Pada perkembangan selanjutnya, *Charter Act* 1813,dan 1833, EIC berorientasi pada bidang ekonomi,namun pada *Charter Act* 1853, EIC berusaha untuk memperluas kekuasaannya pada bidang politik. Dikeluarkannya Undang-undang tersebut tidak lepas dari situasi politik dan sosial di Inggris. Paham Liberalisme mempengaruhi segala kebijakan Inggris di seberang lautan, termasuk India. Dalam bidang sosial budaya Lord Bentinck (1827-1835) menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk “memperbaiki moral” masyarakat India yaitu penghapusan perbudakan, penghapusan adat istiadat yang tidak selaras dengan paham liberalisme dan dianggap tidak manusiawi (Brown, 1985:70,Wolfert,1989;215).

Pada tahap selanjutnya Inggris menerapkan kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang teknologi dan transportasi sebagai sarana komunikasi antar daerah dan mengawasi berjalannya kekuasaan Inggris di India, dengan membangun jaringan kereta api dan telegraph. Dalam bidang ekonomi, Inggris membangun pabrik-pabrik industri dan hasil produk industri itu dipasarkan kembali ke pasar India. Produk-produk Inggris beredar luas di pasar-pasar India, mengalahkan produk lokal. Tentu saja, barang-barang Inggris lebih mudah terjual, karena selain harganya relatif murah, lama waktu produksi yang cepat memungkinkan Inggris untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Sedangkan, produk lokal mengalami penurunan, disebabkan karena ongkos yang besar dan lama produksi yang berjalan lambat. Para penenun India menderita akibat persaingan dengan pakaian Lancashire dan kehidupan para pegawai rendah, pedagang, perajin, dan buruh sangat menderita ( Lapidus,1999:269, Nehru,1960:231). Pada *Charter Act* 1833, EIC berupaya menerapkan kebijakan yang mengizinkan perpindahan penduduk Inggris ke India,penyiaran agama dan penghapusan monopoli perdagangan kecuali candu dan garam,serta menutup pabrik-pabrik kain di India dan mengimpor pakaian langsung dari Inggris, akibatnya tingkat pengangguran pekerja India meningkat (Wolfert,1989;215).

Persaingan yang tidak seimbang menyebabkan pasar ekonomi masyarakat India menurun, produk-produk India dapat diekspor ke luar negeri melalui EIC dan hal ini berpengaruh pada pasar luar negeri pula. Hasil tekstil Inggris dengan mudah masuk ke India, dan produk India dibatasi penjualannya. Keseimbangan antara industri dan pertanian mengalami kegagalan, sehingga rakyat India

mengalami kelaparan dan dibebani oleh beban ekonomi baru, yaitu dengan pajak yang tinggi yang wajib diserahkan pada para *zamindar* (tuan tanah) dan pemerintah Inggris (Nehru,1960;210,Wolfert,1989;196).

Dampak dari penerapan sistem politik dan sosial Inggris, adalah konflik yang berlangsung tahap demi tahap menjadi suatu bentuk asimilasi dan adaptasi serta ada pula yang berbentuk suatu perlawanan. Modernisasi yang diusung oleh bangsa barat untuk memajukan masyarakat dunia timur bagi kepentingan mereka sendiri, dinilai sebagai bentuk pengrusakan nilai-nilai sosial dan agama yang telah dipegang oleh masyarakat timur, serta industrialisasi menyebabkan keterpurukan ekonomi bagi masyarakat India.

Dengan kedatangan Inggris di India, maka tatanan sosial masyarakat mengalami perubahan alami, pelapisan sosial antara bangsa Inggris dan India, dan Inggris menduduki lapisan sosial teratas. Sedangkan, masyarakat India terbagi lagi menjadi dua yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa. Lambat laun muncul perasaan anti asing, yang akhirnya akan menyebabkan munculnya pemberontakan-pemberontakan (Nehru,1960:340). Dalam bidang pendidikan memunculkan kaum cendekiawan yang berorientasi pada pendidikan ala barat. Respon masyarakat India terhadap proses pendidikan adalah bermunculannya sekolah-sekolah seperti yang diselenggarakan oleh Raymohan Roy dan Tagore serta Sayid Amir Khan, yang berorientasi pada pendidikan lokal dan berdasarkan tradisi Hindu dan Islam ( Nehru, 1960:243).

Dalam bidang politik EIC memanfaatkan konflik internal yang terjadi di Istana Moghul untuk menguasai India. Awal pengadaan militer adalah untuk

menjaga perdagangan yang dilakukan oleh EIC, lambat laun untuk menjaga legitimasi kekuasaan EIC. Pengembangan kekuasaan negara dengan penekanan utamanya pada pengadaan kekuatan militer yang efektif oleh negara. Menurut Erich Kauffman (Varma,2003:243) “esensi negara adalah bersama-sama dengan kemauan untuk menjaga dan mempertahankan diri dengan sukses...ide sosial nyata dari negara adalah kejayaan dalam perang bukan masyarakat dengan kemauan bebas”. Dengan berkembangnya EIC, maka jumlah militer mengalami peningkatan. EIC merekrut anggota militer dari pasukan Inggris sendiri dan pribumi, pasukan itu terdiri dari 3 presidensi, yaitu Bengal, Madras dan Bombay. Ketiga presidensi tersebut anggotanya digabungkan baik latarbelakang agama maupun etnik, walaupun dalam presidensi Bengal, didominasi oleh anggota yang berasal dari kasta tertinggi Hindu. Pasukan pribumi dikenal dengan Sepoy (*Sipahi* = tentara), 80 % mereka direkrut dari kalangan Brahman dan Rajput dan anggota muslim berasal dari Punjab sebagai daerah yang sebagian besar mayoritas menganut Islam. Inggris merekrut dari kaum Brahman dan Rajput, karena Inggris beranggapan bahwa mereka adalah tentara yang mampu dan berkualitas saat Inggris berhadapan dengan kaum Sikh dalam perang Sikh 1845-1846 dan perang Sikh 1848-1849.

Jumlah orang Inggris dan Sepoy dalam militer berbanding 1:3, dan meningkat pada tahun 1857 menjadi 1 :6. Jumlah pasukan Inggris di India 40.000 orang dari 270.000 orang seluruh anggota militer (Leaser,1982:142, Meyer dan Brysac, 1999:140). Keberadaan militer dipandang sebagai perpanjangan

pengawasan EIC terhadap masyarakat India. Perasaan anti Eropa tidak dapat dihindarkan dan menimbulkan reaksi perlawanan dari rakyat India.

Beberapa kebijakan EIC yang dianggap membahayakan agama mereka, faktor yang menyebabkan sensitifitas keagamaan dianggap sebagai faktor langsung munculnya pemberontakan. Perubahan Undang-undang *General Service Enlistment Act* tahun 1856 yang mewajibkan anggota pasukan Sepoy untuk ditempatkan ke luar India yang berarti mereka harus menyeberangi lautan, yang merupakan salah satu larangan dalam kasta tertinggi Hindu (Humayun,1999, tersedia dalam <http://www.defencejournal.com/aug99/rebellion.htm>).

Dalam bidang politik pemerintah EIC telah menggantikan kekuasaan tertinggi, secara teoritis pemerintah Moghul yang berkuasa, namun pada kenyataannya EIC-lah yang berkuasa. Bahkan Moghul mendapat bantuan keuangan dari EIC, selama penguasa Moghul tidak mengalami defisit, EIC dapat dengan mudah melebarkan kekuasaannya. Pemerintah EIC dapat dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan mereka dalam memperluas kekuasaannya. Nehru (1960:34) menyatakan bahwa perlawanan ini jauh dari rasa nasionalisme, dan lebih menunjukkan pada perlawanan yang bersifat kebangsaan, seperti Perang EIC-Myamar, Maratha-EIC dan sebagainya, pemberontakan Sepoy adalah perang terhadap Inggris terbesar yang telah mengakibatkan EIC dibubarkan.

Latar belakang dan faktor penyebab pemberontakan Sepoy terjadi masih dalam perdebatan para sejarawan. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai salah satu usaha konspirasi terhadap EIC, adapula yang berpendapat pemberontakan tentara



dan peristiwa ini dianggap sebagai puncak perasaan anti Eropa yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam segala aspek kehidupan. Lawrence (1997:240) menyatakan bahwa pemberontakan Sepoy adalah usaha konspirasi kerajaan Moghul terhadap EIC, hal itu dilihat dari keterlibatan Sultan Bahadur Shah, penguasa terakhir Moghul yang bekerjasama dalam pemberontakan, namun, pendapat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya, dan hanya sebagai pemberontakan tentara diantaranya diutarakan oleh Leaser. Sedangkan, pendapat yang menyatakan bahwa pemberontakan Sepoy sebagai puncak perasaan anti Eropa diutarakan oleh Nehru (1960:201) dan Arstein (1989:117), hal itu dapat dilihat dari dampak perubahan pada bidang sosial contohnya para pangeran kehilangan hak istimewa mereka dan prestise sosial, kaum brahmana merasa khawatir bahwa pendidikan Inggris yang dipengaruhi paham Evangelical dan Uitarian berimplikasi pada perubahan nilai-nilai tradisional dan Hinduisme (Brown,1985:70). Majumdar (1991;768) beranggapan Sepoy terjadi disebabkan adanya campur tangan Inggris ke dalam kerajaan-kerajaan merdeka. Sebelum tahun 1857, Inggris telah melakukan perjanjian-perjanjian berdasarkan persamaan hak, namun, pada kenyataannya kekuasaan Inggris lebih besar, hal itu berarti pula secara tidak langsung Inggris pun menguasai militer kerajaan tersebut.

Pemberontakan Sepoy dianggap sebagai suatu pemberontakan dan kerusuhan terbesar pada masa Victoria bagi orang Inggris, pemberontakan Sepoy meluas dari pemberontakan militer menjadi pemberontakan yang melibatkan para pemimpin lokal yang tidak merasa puas terhadap kebijakan pemerintah Inggris.

Namun, bagi rakyat India sendiri pemberontakan Sepoy adalah suatu usaha perlawanan, sehingga ada beberapa ahli yang berpendapat peristiwa itu sebagai perang kemerdekaan pertama rakyat India. Pandangan yang menganggap peristiwa tersebut sebagai pemberontakan atau perjuangan adalah dua sudut pandang yang berlainan, yaitu sudut pandang dari Inggris dan sudut pandang India, di Maratha pemberontakan memunculkan perjuangan kebangsaan, namun, dalam tubuh Maratha sendiri terjadi perpecahan yang menyebabkan mereka tidak memperoleh dukungan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa walaupun peperangan itu meluas hampir ke seluruh India, namun, perang itu tidak terorganisasi, bersifat spontan dan hanya dipimpin oleh para pemimpin feodal dan pengikutnya sebagaimana yang diutarakan Nehru. Pasukan Inggris dibantu oleh orang-orang Sikh dan Gurkha untuk mengatasi pemberontakan. Nehru (1960:245) menyatakan bahwa pemberontakan Sepoy merupakan sebuah revalitas kejayaan bangsa Maratha dan muslim, peristiwa tersebut tidak lebih dari kebangkitan feodalisme India dan masih jauh dari kebangkitan nasionalisme India. Selama ini pemberontakan Sepoy dipahami sebagai pemberontakan yang disebabkan permasalahan agama, agama dijadikan sebagai propaganda politik. Padahal pemberontakan Sepoy tidak hanya sebuah masalah agama, tetapi masalah yang kompleks menyangkut atas adanya perubahan sosial-budaya dan politik. Oleh sebab itu, penulis memberi judul skripsi ini” Pemberontakan Sepoy tahun 1857 di India: Proses perlawanan Rakyat India terhadap East India Company (EIC)”.



## **I.B. Pertanyaan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menitikberatkan pada proses pemberontakan dan faktor-faktor penyebabnya. Untuk mengidentifikasi jawaban atas rumusan masalah di atas, maka diuraikan rumusan masalah lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah pemerintah Inggris untuk merekrut pribumi atau pasukan Sepoy menjadi sekutunya ?
2. Apa yang menjadi latar belakang dan faktor pemicu timbulnya pemberontakan Sepoy?
3. Apa dampak Pemberontakan Sepoy terhadap pemerintahan Inggris ?

## **I.C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diajukan, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah memperkaya wawasan mengenai pergerakan nasionalisme bangsa-bangsa di Asia Selatan, khususnya India, sedangkan tujuan secara khusus adalah:

1. Menguraikan penerapan dan dampak dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan EIC terhadap masyarakat India.
2. Mengdeskripsikan proses berlangsungnya pemberontakan Sepoy.
3. Mengidentifikasi reaksi masyarakat India terhadap Pemberontakan Sepoy dan perjuangan kemerdekaan India dan dampak bagi pemerintah kolonial Inggris.

## **I.D. Penjelasan Istilah**

Pemberontakan dapat pula berarti perlawanan atau penentangan akibat merasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, kedudukan sosial yang tidak pantas, aspirasi yang dikejar tidak tercapai, perlakuan yang tidak adil atau kekuasaan politik tidak dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya (Simatupang dan Lopian,1978:3). Adapun pendapat lain mengenai pemberontakan adalah usaha yang bertujuan untuk menggulingkan tanpa mengubah bentuk pemerintahan dengan cara kekerasan dan paksaan (Soekanto,1985:230). Untuk mengkaji maksud dari konteks pemberontakan Sepoy tersebut merupakan perlawanan akibat perasaan tidak puas terhadap keadaan sosial budaya dan perlakuan tidak adil dari pemerintah Inggris sehingga mengakibatkan perasaan anti Eropa yang mendalam.

## **I.E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah landasan untuk berpikir dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Kajian pustaka dilakukan melalui menganalisis dan mempelajari tulisan-tulisan yang dianggap relevan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ingin diungkapkan oleh penulis. Adapun beberapa tulisan serta sumber-sumber tersebut diantaranya adalah *The Red Fort The Story of The Indian Mutiny 1857*, Leaser (1982), yang memaparkan proses berlangsungnya pemberontakan sepoy secara kronologis, buku-buku yang setidaknya dapat membantu penulis dalam menganalisis faktor penyebab munculnya pemberontakan sepoy diantaranya adalah Arstein,(1988) *The British*

*Yesterday and today 1830-present*, Nehru,(1960), *Discovery of India*. Karya Judith Brown (1985), *Modern India The Origin of An Asia Democracy* memaparkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh EIC di India. *The First India Independence War*, Marx dan Engel,(1959) memaparkan mengenai pemberontakan sepoy sebagai perjuangan masyarakat India melawan kekuasaan EIC yang mereka anggap sebagai suatu badan perdagangan dari kumpulan para *borjouis*. Untuk menganalisis secara komprehensif penulis pun menggunakan sumber-sumber yang dianggap mampu menganalisis perubahan sebelum dan selama proses pemberontakan sepoy melalui kajian teoritis. Perubahan sosial dan ketimpangan budaya dari sumber-sumber sosiologi antropologi seperti Soekanto, (2002) *Pengantar Sosiologi* dan Koentjaraningrat (1981), *Pengantar Antropologi*. Selain sumber berupa literatur, penulis pun menggunakan sarana Internet untuk memperoleh artikel-artikel yang relevan dengan rumusan masalah penulis.

#### **I.F. Metode dan Cara Penelitian**

Metode adalah prosedur, teknik, cara-cara yang sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan (Syamsudin,1996:60). Dalam mengkaji pemberontakan Sepoy 1857, penulis menggunakan Metode historis. Metode historis adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottchalk, 1986; 32). Agar dapat mengumpulkan data dan menganalisis fakta yang berasal dari masa lampau dengan baik maka melalui proses atau langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Helius Syamsudin yaitu:

### *1. Heuristik*

Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah, penulis berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat kesulitan dalam memperoleh sumber-sumber primer, dan hanya menemukan sumber sekunder yang berupa studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karya penulis lain. Untuk menjaga objektivitas penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku yang ditulis oleh sejarawan yang menulis tentang pemberontakan Sepoy dari sudut pandang orientalis, dan buku-buku yang ditulis oleh orang India sendiri. Untuk memudahkan penulis pun membaginya menjadi 3 yaitu pihak yang pro terhadap pemberontakan, kontra dan netral terhadap pemberontakan Sepoy. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode historis melalui pengkajian deskriptif-analitis tanpa mengabaikan pengkajian deskriptif-naratif.

Adapun penulis menggunakan teknik penelitian studi literatur karena bagi penulis teknik ini paling sesuai untuk mengkaji permasalahan, teknik observasi atau wawancara tidak memungkinkan penulis karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penulis dari segi dana, bahasa dan geografis. Dalam proses pengumpulan data tersebut penulis mengunjungi berbagai perpustakaan, karena perpustakaan merupakan tempat yang paling cocok, dengan demikian kita dapat mengakses berbagai macam sumber yang relevan dengan permasalahan. Perpustakaan yang dikunjungi diantaranya adalah perpustakaan UPI, perpustakaan KAA, perpustakaan Angkatan Darat dan sebagainya. Penulis pun mendapat

bantuan peminjaman buku dari dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa yang ikut membantu penulis dalam mendapatkan buku sumber yang relevan, dan melakukan pencarian data melalui akses internet, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap.

## *2. Kritik*

Kritik merupakan metode yang digunakan untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan penulis pada tahap Heuristik, kemudian dianalisis dengan dua cara yaitu kritik terhadap materi serta kritik terhadap isi. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, penulis melakukan kritik sumber. Kritik sumber itu bersifat internal dan eksternal, fungsi dari kritik sumber bagi sejarawan dalam mencari kebenaran maka sejarawan dihadapkan untuk membedakan antara fakta dan pendapat, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang mungkin dan apa yang meragukan. Kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian sumber terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Sjamsudin,1996;104-109). Dalam segi kritik internal, yang merupakan cara pengujian sumber dari dalam atau isi. Menurut Syamsudin (1996;115) kredibilitas pengarang suatu literatur diperlukan yang akan membantu sejarawan untuk menegakkan kompetensi dari kebenaran. Dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan-keterbatasan dalam segi dana dan geografis, penulis menggunakan sumber sekunder berhubung sumber primer sangat sulit ditemukan.

## *3. Interpretasi*

Dalam penulisan sejarah digunakan tiga bentuk teknik dasar tulis menulis yaitu deskripsi, narasi dan analistis. Ketika sejarawan menulis ada keinginan

untuk menjelaskan sejarah dengan cara cipta ulang dan menafsirkannya (Sjamsudin, 1996;157). Tahap ini merupakan tahap pemberian makna dan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh tentang keadaan India saat berlangsungnya Pemberontakan Sepoy sehubungan atas diberlakukannya kebijakan-kebijakan EIC terhadap rakyat India, yang telah dikumpulkan pada saat Heuristik dan telah dinilai dalam tahap kritik.

Penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah atau data sekunder yang memuat fakta-fakta dan analitis penulis lain yang relevan dengan kajian skripsi ini. Hal ini berkaitan dengan pendekatan sosio-antropologi yang penulis gunakan dalam mengkaji latar belakang mengenai permasalahan yang sedang dikaji dalam studi ini. Penulis melakukan penafsiran sintesis yaitu menggabungkan semua yang menjadi penggerak sejarah, penafsiran ini tidak ada kategori faktor sebab-sebab tunggal untuk menjelaskan semua fase dan periode perkembangan sejarah (Sjamsudin, 1996;165) artinya perkembangan dan berlangsungnya suatu peristiwa sejarah digerakkan oleh berbagai faktor.

#### *4. Historiografi*

Penulis menyajikan hasil temuan-temuan dari sumber-sumber yang telah mengalami Proses di atas yang telah dikumpulkan, seleksi, analisis dan direkonstruksi secara analitis dan imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Hasil rekonstruksi tersebut penulis tuangkan melalui penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan.



Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber dengan menggunakan teknik studi literatur, sumber-sumber yang penulis temukan sebagian besar menggunakan bahasa asing, sehingga perlu kecermatan dalam mengartikan agar apa yang ditulis oleh sejarawan asing tersebut maknanya tidak kabur karena kesalahan penulis dalam menafsirkannya. Selain menerjemahkan buku-buku, artikel internet, penulis pun meminta bantuan kepada beberapa rekan mahasiswa untuk membantu menerjemahkan buku-buku dan artikel sehingga informasi yang didapat dapat disusun dengan cepat.

## **I.G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, dan pembatasan masalah,tujuan penulisan, metode dan cara penulisan,kajian pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dibahas berbagai literatur yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi. Hasil dari studi literatur tersebut dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh dan membangun landasan teoritis dan kerangka berpikir sehingga penulis dapat mempelajari permasalahan yang dikaji secara lebih dalam.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan langkah-langkah yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian.

### BAB IV PEMBERONTAKAN SEPOY DAN BERAKHIRNYA KEKUASAAN EAST INDIE COMPANY (EIC)

Dalam bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang menjadi pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan diungkapkan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan diatas secara keseluruhan dan merupakan jawaban atas masalah-masalah tersebut.



